

## SEKILAS MEDIA

Sinar Indonesia Baru  
Rabu, 15 September 2010

**“Tak Masuk Listrik, PPK Dinkes Akui Proyek Poskesdes Rp \$M Jadi Temuan BPK”**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu, Supriadi, mengakui belum sepenuhnya mengawasi pekerjaan proyek pembuatan gedung Pos Kesehatan Desa. Diakuinya pula proyek tersebut menjadi temuan BPK karena terdapat kelebihan pembayaran yang berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 201 juta.

Waspada  
Kamis, 16 September 2010

**“BPK RI Temukan Pengadaan Barang Di Pakpak Bharat Salahi Keppres”**

Tim BPK RI Provinsi Sumatera Utara menemukan proses pengadaan barang di Sekretariat Daerah Pakpak Bharat menyalahi Keppres 80/2003. Dari hasil pemeriksaan pertanggungjawaban 12 kontrak pengadaan barang senilai Rp 1,5 Miliar lebih tersebut diketahui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan tidak berdasarkan survei harga di lapangan tetapi sebesar pagu dalam APBD.

Sinar Baru Indonesia  
Rabu, 29 September 2010

**“Temu Konsultasi Bakohumas Pemprovsumu Bekerjasama dengan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara : BPK Telah Serahkan ke Kejaksaan Dugaan Korupsi Pemkab Nias Rp 5 M, Terkait Biaya Perjalanan Dinas 2007-2009”**

BPK RI Perwakilan Sumatera Utara telah menyerahkan ke Kejaksaan kasus dugaan korupsi Pemkab Nias terkait biaya perjalanan dinas tahun 2007-2008 dengan nilai sekitar Rp 5 M dan Dinas PU Pemkab Deli Serdang dengan nilai Rp 400 jutaan.

Sumut Pos  
Kamis, 30 September 2010

**“Motivasi Pengelolaan Keuangan”**

Kasubag Hukum dan Humas, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Mikael P.H. Togatorop, S.H., M.Hum. dalam acara Temu Konsultasi Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemprovsumu bekerja sama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Ruang Balai Citra Tiara Convention Centre Medan menyatakan bahwa secara umum laporan keuangan SKPD kabupaten/kota di Sumatera Utara sudah menunjukkan kemajuan, ke depan tetap dibutuhkan perbaikan.



**REDAKSI**

Mikael PH Togatorop (mt),

Barani M Silalahi (bs), Hj.Sri Madonna (sm), Hj.Ony Mauli (oni), Parulian (uli), Monika (mon),

Ermila Oethari (mil), Suhendri (henz), Totok (ttk), Ardhiyan (ard), Arief R (arra),

Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr)

ALAMAT REDAKSI : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Lt. IV, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan

Telp. 061-4519039 ext. 321



Tahun Ketiga  
Edisi September 2010

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



**DARI REDAKSI**

**Pentingnya Diseminasi Informasi**

Diseminasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu tertentu agar mereka memperoleh informasi sehingga timbul kesadaran, menerima dan pada akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi dapat bertujuan untuk menyebarluaskan suatu pemikiran tertentu atau informasi yang lain seperti undang-undang, maupun yang bersifat keilmuan agar dipahami sepenuhnya oleh kelompok atau individu sasaran.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah diundangkan pada tanggal 19 Juli 2004. Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah resmi diberlakukan pada tanggal 30 Oktober 2006. Sampai dengan saat ini BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai institusi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di wilayah Provinsi Sumatera Utara senantiasa melakukan diseminasi undang-undang tersebut baik kepada para pemilik kepentingan maupun masyarakat secara luas. Hal ini bertujuan agar para pemilik kepentingan dan masyarakat semakin memahami tentang bagaimana sebenarnya pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang selama ini dilakukan oleh BPK RI. Dengan adanya hal ini tentu saja diharapkan masing-masing pihak dapat lebih mengetahui tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (mt)

**Daftar Isi ...**

**Hal.1**

Dari Redaksi  
Halal Bi Halal, Saling Memafkan

**Hal.2**

Diseminasi UU 15/2004 dan UU 15/2006

**Hal.3**

Temu Konsultasi Bakohumas  
Kunjungan Kerja Sekjen

**Hal.4**

Kenali Entitas

**Hal.5**

Ada Keluhan,  
Laporkan Saja!

**Hal.6**

Merasakan Suasana Malam  
Kota Medan di Merdeka  
Walk

**Hal.7**

Pojok Bahasa Anak Medan  
Tentang BPK

Galeri Foto

**Hal. 8**

Sekilas Media

**HALAL BI HALAL,**

**SALING MEMAAFKAN**

Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1431 H dan untuk menjalin tali silaturahmi antarpegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara maka Serikat Tolong Menolong (STM) Muslim mengadakan halal-bihalal di Rumah Dinas Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara ini dilaksanakan pada Selasa, 21 September 2010 pukul 11.00 – 13.00 WIB.

Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mulai dari pegawai pelaksana hingga jajaran pejabat struktural. Acara ini sekaligus sebagai acara perpisahan bagi beberapa pegawai yang akan dimutasi maupun promosi, yaitu Drs. Khabib Zainuri, Kepala Subauditorat Sumut II yang mendapatkan promosi ke Auditorat Keuangan Negara II dan Syafrezza Athariq, S.E., Ak., M.Si., Kepala Seksi Sumut II A, yang dimutasi ke BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat serta beberapa staf lain yang dimutasi ke kantor pusat maupun



ke kantor perwakilan lainnya. Selain itu acara ini juga sebagai acara syukuran bagi Tornanda Syaifullah, S.E., Ak., M.M., Kepala Subauditorat Sumut III, yang akan menjalankan ibadah haji tahun ini.

Momen Idul Fitri merupakan saat yang tepat bagi kita untuk saling memaafkan. Melalui acara ini diharapkan akan mampu mempererat tali persaudaraan antarpegawai khususnya di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1431 H, Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon maaf Lahir dan Batin. (dkr)



## DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006

Subbagian Hukum dan Humas, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut) mengadakan acara Diseminasi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Acara ini dilaksanakan di auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut pada Senin, 27 September 2010, dengan mengundang anggota DPRD Tingkat II dari empat kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Acara ini dibagi menjadi dua sesi yaitu pagi dan siang. Pada sesi pagi, acara dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB dengan peserta anggota DPRD Tingkat

II dari Kota Binjai dan Kabupaten Samosir. Sedangkan untuk sesi siang dimulai pukul 14.00 sampai dengan 17.00 WIB dengan peserta anggota DPRD Tingkat II dari Kabupaten Simalungun dan Kota Tanjung Balai.

Acara dibuka oleh Drs. Eri Nugroho selaku Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut dan dimoderatori oleh Suyono, S.E., M.Sc., Ak. selaku Kepala Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut. Pada sesi pagi, bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, Drs. Oodj Huziat, yang menjelaskan materi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan dan Kepala Subauditorat Sumut I, Yusnadewi, M.Si., Ak., yang menjelaskan materi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada sesi siang, materi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan masih tetap disampaikan oleh Drs. Oodj Huziat sedangkan untuk materi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara disampaikan oleh Tornanda Syaifullah, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Subauditorat Sumut III.

Acara ini diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut sebagai sarana untuk mensosialisasikan undang-undang yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini laporan keuangan pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara belum ada yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Bahkan salah satu kota peserta kegiatan ini, yaitu Kota Binjai, mendapatkan opini Tidak Wajar untuk laporan keuangan daerahnya. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya diseminasi ini akan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (dkr)



## POJOK ANAK-MEDAN BAHASA

**Bedangkik** artinya hitung-hitungan, pelit

**Berondok** artinya bersembunyi

**Koyak** artinya robek

**Mengkek** artinya manja

**Merepet** artinya mengomel, marah

Sumber : [www.kamus-medan.blogspot.com](http://www.kamus-medan.blogspot.com)

## SETAHUN KEMARIN.....

Sejenak menengok kegiatan di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di bulan September setahun yang lalu....



Perpisahan Bang Bono, salah satu pegawai BPK RI Perwakilan Prov. Sumut, Rabu, 16 September 2009. Beberapa pejabat struktural, termasuk mantan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Prov. Sumut, Widodo Prasetyo Hadi, S.E., M.M., memberikan tanda tangan di kaos yang dikenakan oleh Bang Bono sebagai kenang-kenangan.

## - Galeri Foto Bulan Ini -



Keterangan Foto : penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada beberapa kota/kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara